

## CURICULUM VITAE

### Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Prof. Dr. Alwi, M.Si
2	Jabatan Fungsional	Guru Besar
3	E-mail	<a href="mailto:alwiazis_63@yahoo.com">alwiazis_63@yahoo.com</a> & <a href="mailto:alwi@unhas.ac.id">alwi@unhas.ac.id</a>
4	Sinta Id	6021519
5	Scopus Id	57205055342
6	Google Scholar Id	f_XMwyEAAAAJ
7	Alamat Kantor	Fisip Unhas Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Tamalanrea-Makassar
8	Nomor Telepon/Faks	(0411) 585 024 (PSW. 1165)

### Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	Universitas Gadjah Mada	Universitas Padjajaran
Bidang Ilmu	Ilmu Administrasi	Ilmu Administrasi Publik	Ilmu Administrasi
Tahun Masuk-Lulus	1983-1988	1994-1996	2003-2007
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Barru	Kader Pembangunan Desa: Motivasi Birokrasi Dalam Pembangunan	Analisis Tentang Sistem Jaringan Antar Organisasi Dalam Penentuan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus Pada BP-KAPET Pare-Pare di Prov. Sulawesi Selatan)
Nama Pembimbing/Promotor	Drs. S. Pilopadang	Dr. Yeremias T. Keban, MURP	Prof. Dr. Djaja Saifulah

### Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Status	Sumber Pendanaan
1	1997	Peranan Birokrat Lokal Dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Dati II Selayar	Anggota	Kementerian Pendidikan
2	1993	Peranan Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan di Desa Pao-	Ketua	LPPM Unhas

		Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, Lembaga Penelitian Unhas.		
3	1994	Pengembangan Partisipasi Wanita Pedesaan Dalam Pembangunan Sosial Melalui Pendidikan Luar Sekolah di Kabupaten Dati II Maros	Anggota	Kementerian Pendidikan
4	1994	Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai di Fisip Unhas	Anggota	LPPM Unhas
5	1995	Keluarga Berencana: Tingkat Penerimaan dan Adopsi Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan	Anggota	Kementerian Pendidikan
6	1997	Peningkatan Partisipasi Wanita Pedesaan Pantai Dalam Program PKK di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru	Ketua	LPPM Unhas
7	1997	Evaluasi Terhadap Kualitas Pelayanan Aparatur di Kawasan Timur Indonesia, Kerjasama LAN Makassar, (Anggota)		Kemenristek
8	1998	Kader Pembangunan Desa (KPD) : Analisis Perannya Dalam Pembangunan Desa Miskin Di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan	Ketua	Kementerian Pendidikan
9	1999	Evaluasi Kebijakan Pengembangan Karier PNS dan Simplikasi Prosedur Calon Peserta Diklat di Kawasan Timur Indonesia, Kerjasama LAN Makassar	Anggota	LAN RI
10	2002	Analisis Kemampuan Rumah Sakit DR. Wahidin Sudiro Husodo Melakukan Manajemen Perubahan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Anggota	Kementerian Pendidikan
11	2002	Model Strategi Inovasi Organisasi Industri Kecil Minuman Markisa Dalam meningkatkan daya saing organisasi di Kota makassar (Analisis Change Management)	Anggota	Kementerian Pendidikan
12	2003	Model Strategi Inovasi Organisasi Industri Kecil Minuman Markisa Dalam meningkatkan daya saing organisasi di Kota makassar (Analisis Change Management)	Anggota	Kementerian Pendidikan
13	2007	Analisis Tentang Sistem Jaringan Antar Organisasi Dalam Penentuan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (BP-KAPET) Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan	Disertasi	

14	2009	Analisis Jaringan Antar Organisasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Demokratis: Studi Kasus Penyelenggaraan Pelayanan angkutan Kota di Kota Makassar.	Ketua (Tahap 1)	Kementerian Pendidikan (Penelitian Hibah Tim Pascasarjana)
15	2010	Analisis Jaringan Antar Organisasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Demokratis: Studi Kasus Penyelenggaraan Pelayanan angkutan Kota di Kota Makassar.	Ketua (Tahap 2)	Kementerian Pendidikan (Penelitian Hibah Tim Pascasarjana)
16	2011	Analisis Jaringan Antar Organisasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Demokratis (Studi Kasus Penyelenggaraan Pelayanan angkutan Kota di Kota Makassar) – Tahap 3 (Ketua)	Ketua (Tahap 3)	Kementerian Pendidikan (Penelitian Hibah Tim Pascasarjana)
17	2011	Evaluasi Program Asuransi Kesejahteraan Sosial di Indonesia	Ketua	B2P3KS. Yogyakarta (Kementerian Sosial)
18	2013	Model Jaringan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan Pengembangan Kakao Di Koridor Ekonomi Sulawesi (Studi Kasus Pada Kebijakan Pemberdayaan Petani Kakao Di Provinsi Sulawesi Selatan)	Ketua	PENPRINAS-MP3EI Kemenristek Dikti
19	2013	Efektivitas Pelayanan Jasa Pegawai di Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota	Jasa Raharja
20	2014	Model Akuntabilitas Kebijakan Publik (Studi Kasus Jaringan Implementasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar)	Ketua	Penelitian BOPTN UNHAS
21	2014	Model Implementasi Kebijakan Kemiskinan Terpadu Di Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota	Penelitian BOPTN UNHAS
22	2016	Model Kebijakan Governance Kolaboratif Dalam Rangka Pengembangan Usaha Kakao Di Koridor Ekonomi Sulawesi: Studi Kasus Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Kakao di Provinsi Sulawesi Selatan	Ketua (Tahap 1)	PENPRINAS-MP3EI Kemenristek Dikti
23	2017	Model Kebijakan Governance Kolaboratif Dalam Rangka Pengembangan Usaha Kakao Di Koridor Ekonomi Sulawesi: Studi Kasus Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Kakao di Provinsi Sulawesi Selatan	Ketua (Tahap 2)	PENPRINAS-MP3EI Kemenristek Dikti
24	2018	Model Kebijakan Governance Kolaboratif Dalam Rangka Pengembangan Usaha	Ketua (Tahap 3)	PENPRINAS-MP3EI Kemenristek Dikti

		Kakao Di Koridor Ekonomi Sulawesi: Studi Kasus Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Kakao di Provinsi Sulawesi Selatan		
25	2018	Model Pengembangan Kapasitas Birokrasi Level Bawah Terpadu Dalam Implementasi Kebijakan Diversifikasi Pangan di Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota (Tahap 1)	Kemenristek Dikti
26	2019	Model Pengembangan Kapasitas Birokrasi Level Bawah Terpadu Dalam Implementasi Kebijakan Diversifikasi Pangan di Provinsi Sulawesi Selatan	Ketua (Tahap 2)	Kemenristek Dikti
27	2020	Model Pengembangan Kapasitas Birokrasi Level Bawah Terpadu Dalam Implementasi Kebijakan Diversifikasi Pangan di Provinsi Sulawesi Selatan	Ketua (Tahap 3)	Kemenristek Dikti
28	2020	Local Governance Network Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Kebijakan Ketahanan Pangan: Studi Kasus Jaringan Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Provinsi Sulawesi Selatan, (Ketua-Tahap 1)	Ketua (Tahap 1)	Kemenristek Dikti

### Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Sumber Pendanaan
1	1992	Penyuluhan Manajemen Pembangunan Desa di Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, (Ketua)	LPPM Unhas
2	1998	Studi Kelayakan Pembangunan Panti Sosial Marsudi Putra Sulawesi Selatan, (Anggota)	Kementerian Sosial
3	2000	Restrukturisasi Organisasi Kabupaten Fakfak Propinsi Irian Jaya Dalam Rangka Menghadapi Otonomi Daerah.	Pemda Fakfak
4	2000	Restrukturisasi Organisasi Kabupaten Selayar Propinsi Sulawesi Selatan Dalam Rangka Menghadapi Otonomi Daerah,	Pemda Selayar
5	2001	Penyusunan Analisis Jabatan Kabupaten Fakfak Propinsi Irian Jaya Dalam Rangka Menghadapi Otonomi Daerah.	Pemda Fakfak
6	2002	Kajian Model Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Kerjasama Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan dengan LPPM UNHAS, (anggota).	Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI

7	2002	Profil Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Kerjasama Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan dengan LPPM UNHAS, (anggota)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI
8	2002	Mempersiapkan LPM UNHAS sebagai Lembaga Advokasi dan Fasilitasi Terhadap Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Kerjasama Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan dengan LPPM UNHAS, (Ketua)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI
9	2003	Kuliah Kewirausahaan FISIP UNHAS, (Ketua)	Dikti, Kementerian Pendidikan
10	2006	Sebagai Fasilitator Daerah Dalam Penyusunan "Work Plan" dalam <i>Building and Reinventing Decentralize Governance (BRIDGE) Programme</i> (Program UNDP-BAPPENAS), Provinsi Sulawesi Selatan.	Konsultan/Tenaga Ahli
11	2007	Restrukturisasi Organisasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
12	2008	Penyusunan Kompetensi Inti Daerah, Provinsi Sulawesi Selatan, Kerja Sama Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI dengan PT. Rensa Kerta Mukti	Konsultan/Tenaga Ahli
13	2008	Pelaksanaan Program "RISE" (Regional Infrastructure for Social and Economic Development), Kerjasama Antara Departemen PU RI, BAPPENAS, dan DEPDAGRI, di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Barat, 2008 – 2010.	Konsultan/Tenaga Ahli
14	2010	Pelaksanaan Program "RISE" (Regional Infrastructure for Social and Economic Development), Kerjasama Antara Departemen PU RI, BAPPENAS, dan DEPDAGRI, di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Barat, 2008 – 2010.	Konsultan/Tenaga Ahli
15	2012	Bimbingan Teknis Desain Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Raja Ampat	Pemda Kabupaten Raja Ampat
16	2012	Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kabupaten Raja Ampat	Pemda Kabupaten Raja Ampat
17	2013	Analisis Restrukturisasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara	Pemda BAU-BAU
18	2013	Dinamika Spasial MP3EI Koridor Sulawesi, Kerja sama Bakostranal dengan PT. Rensa Kerta Mukti	Konsultan/Tenaga Ahli
19	2016	Kajian Rencana Strategik Pembangunan Desa Kabupaten Raja Ampat	Pemda Raja Ampat

20	2016	Desain Rencana Strategis Pembangunan Desa di Kabupaten Raja Ampat	Pemda Raja Ampat
21	2016	Panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat,	Pemda Mamuju Utara
22	2017	Panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat,	Pemda Polman
23	2018	Kajian Perencanaan Desa Dan Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Desa Kabupaten Wajo	Pemda Wajo
24	2018	Penyusunan SOP Sekretariat Kabupaten Banggai,	Pemda Banggai
25	2018	Survey Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Dalam Persepsi Dan Penilaian Masyarakat,	Pemda Banggai
26	2019	Kajian Penyusunan Roadmap Inovasi Daerah Kabupaten Enrekang, 2019	Pemda Enrekang
27	2020	Kajian Penempatan ASN Dalam Jabatan Struktural/Fungsional Kabupaten Mamuju Tengah,	Pemda Mamuju Tengah
28	2020	Road Map Pengembangan Kapasitas SDM ASN Kabupaten Mamuju Tengah, 2020	Pemda Mamuju Tengah
29	2020	Road Map Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Terpadu Kabupaten Mamuju Tengah,	Pemda Mamuju Tengah
30	2020	Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah,	Pemda Mamuju Tengah
31	2020	Kajian Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bone,	Pemda Bone

### Publikasi Artikel Ilmiah

<b>NO</b>	<b>JUDUL ARTIKEL ILMIAH</b>	<b>NAMA JOURNAL</b>	<b>VOLUM/) Nomor/Tahun</b>
1	Keberhasilan Kader Pembangunan Desa (KPD): Motivasi Birokratik dan Realitas Pembangunan (Bersama dengan Yeremias T. Keban dan Ichlasul Amal).	Publikasi Penelitian Pascasarjana Universitas Gadjah Mada	Jilid 10. No. (2A). Mei 1997. Yogyakarta. 1997.

2	Pengembangan Sumber Daya Aparatur Dalam Rangka Otonomi Daerah (Studi Evaluasi Program Diklat SDM Aparatur).	“Visi Administrasi” Jurnal Ilmu Administrasi Fisip Unhas. Makassar.	2001
3	Strategi Pemberantasan Korupsi Birokrasi Melalui Sistem Jaringan Antar Organisasi di Indonesia.	“Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung.	Vol.2. No. 3. Bandung.2005
4	“Kecil Itu Gesit”: Visi Baru Pemerintahan Daerah di Indonesia.	“Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung.	Vol.2. No. 4. Bandung. 2005.
5	Gaya Kepemimpinan Birokratik vs. Gaya Manajerial Dalam Organisasi Pemerintahan Daerah.	“Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung.	Vol.3. No. 2. Bandung. 2005.
6	Efektivitas Pemanfaatan Hasil Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Melalui Reorientasi Organisasi Pelayanan Publik Dalam Era Otonomi Daerah.	“Jurnal Diklat Aparatur” Bidang Diklat Aparatur Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN Bandung.	Vol. 2. No. 1. Bandung. 2006.
7	Menciptakan Birokrasi Pemerintahan Daerah Yang Profesional.	“Economics & Business Strategy Journal	Vol. 4 Juni 2006, STIE Dharma Bharata, Kendari 2006.
8	Implementasi Kebijakan dan Pelayanan Publik (Kasus Pada Pelayanan Angkutan Kota)	”Visi” Jurnal Ilmu Administrasi Fisip Unhas, Makassar,	Vol. VIII/ No. 1/April/2007.

9	Strategi Jaringan Antar Organisasi untuk Akuntabilitas Publik yang Demokratis.	"Jurnal Administrasi Negara" STIA LAN, Makassar.	Vol. 16, No. 1/Maret 2010 – ISSN: 1410-8399.
10	Network Implementation Analysis on Democratic Public Service	International Journal of Administrative Science & Organization "Bisnis & Birokrasi"	Volume 19, Number 2, May 2012. ISSN 0854-3844. Universitas Indonesia
11	Implementation of Urban Transportation Policy Based on Law 22 Year 2009 on Road Traffic and Transportation.	Jurnal "Masalah-Masalah Hukum". Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang..	Jilid 41 No. 2, April 2012 – ISSN 2086 – 2695
12	Wicked Problem dan Pendekatan Jaringan Dalam Pengentasan Kemiskinan	Jurnal Ilmiah Administrasi Publik.	Volume IX Nomor 2/ Agustus 2013. PKP2A II LAN, Makassar
13	Kebijakan Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Program Gernas Kakao di Luwu Utara	Jurnal Administrasi Negara. STIA LAN, Makassar.	Volume 19 N0.3/September 2013. ISSN: 1410-8399.
14	Democracy and Efficiency: An Analysis on City Transportation Service Delivery Network In Makassar City, South Sulawesi,	International Journal of Multidisciplinary Thought	Vol. 04 N0. 02 ISSN: 2156-6992 / 2014
15	Analysis of Local Government Capacity Building Network In Empowering Vendors Policy Implementation in Makassar City, Indonesia	European Journal of Reseach in Social Sciences	Vol.2.No.2, 2014 ISSN: 2056-5429
16	Bureaucratic system VS People empowerment policy : emperical evidence cocoa farmer empowerment policy in south sulawesi province, Indonesia	Humanities and Social Sciences Review	Vol. 3 No.4, 2014 ISSN : 2165-62582014
17	Model Akuntabilitas Kebijakan Publik: Studi Kasus Jaringan Implementasi Kebijakan PKL di Kota Makassar	Jurnal MSDM, Program Studi MSDM, Fakultas Manajemen, IPDN, Sumedang, Jawa Barat	Vol. 1 Nomor 2, Desember 2014 ISSN: 2407-6244
18	Democratic Model of Public Policy Accountability, Case Studi on	JGP, Journal of Government and Politics,	Vol 6 No. 2 August 2015

	Implementation of Street Vendors Empowerment Policy in Makassar City	Universitasa Muhammadiyah Yogyakarta	
19	Analysis Of Institutional Actors In Rice Policy Implementation In South Sulawesi Province, Indonesia.	In ASSRJ Advances of Social Sciences Research Journal.	ISSN 20550286. Vol. 2, No. 12, 2015.
20	Dilemma Of Values In Public Policy Accountability: Implementation of The Street Vendors Empowerment Policy Network In Makassar City.	The International Academic Forum (IAFOR) Japan. Official Conference Proceeding.	ISSN: 2189 – 1001. pp. 1-14, 2015
21	Model Jaringan Kebijakan Publik (Perumusan Kebijakan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Di Kabupaten Bulukumba).	JAKPP: Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik.	2015. Vol. 1 No. 2
22	Resources Exchange Model in Implementation Network of Fishermen Community Policy in Makassar City.	Journal of Government and Politics	2017. Vol. 8. No. 1
23	Local Collaborative Network: Is it Smart Implementer of The Cocoa Business Development Policy in Indonesia?)	International Journal of Public Policy,	Vol. 14, Nos. 5/6, 2018. (Scopus Indexed, - Q4)
24	Discretion Dilemma of Street-Level Bureaucracy in Implementation of the Street Vendors Empowerment Policy in Makassar City, Indonesia.	American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)	e-ISSN : 2378-703X Volume-02, Issue-08, pp-106-115. 2018

### Pemakalah Seminar Ilmiah

No	Nama Temu Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Bekerja Sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, 27 Oktober 2008.	Strategi Jaringan Antar Organisasi Untuk Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara. Makalah ini disampaikan pada Seminar Pemantapan dan Harmonisasi RUU tentang Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara,	Makassar, 27 Oktober 2008.
2	Pada Pelatihan Tingkat Provinsi PNPM-PISEW di Mamuju Sulawesi Barat, tgl. 20 – 27 Oktober 2008. (8 hari)	Pemateri “Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat”	Mamuju Sulawesi Barat, tgl. 20 – 27 Oktober 2008. (8 hari)

3	Pada Pelatihan Tingkat Provinsi PNPM-PISEW	Pemateri “Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat”	Makassar Sulawesi Selatan. tgl 2 – 8 Februari 2009. (7 hari)
4	Diselenggarakan oleh Program Magister Administrasi Publik FISIP UNHAS.	Penelitian Kebijakan Publik: Ruang Lingkup Dan Perkembangannya. Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional dan Lokakarya Penelitian Administrasi,	FISIP UNHAS, pada tgl. 4 – 5 Agustus 2010, Makassar.
5	Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia, Jurusan Ilmu Administrasi FISIP UNHAS, Jurusan Ilmu Sejarah FIB UNHAS, Tempo Institute, dan Aliansi Jurnal Indonesia	Model Birokrasi Yang Demokratis: Pergeseran Nilai-nilai Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Makalah ini dipresentasikan pada diskusi panel dengan topic “Bicara tentang Akar Demokrasi Indonesia”, yang	Tgl. 31 Agustus – 2 September 2010 di PKP, UNHAS, Makassar.
6	International Conferenc on Public Organization	Analysis of Democratic Public Servicw Network (case study in Urban Transportation Service in Makassar City, South Sulawesi Province, Indonesia): Challenge to Develop A New Public Organization Management In The Era of Democratization	Tanggal 21 Januari-22 Januari 2011, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
7	Seminar Nasional “Penguatan Administrasi Negara/Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat	Wicked Problem dan Pendekatan Jaringan Dalam Pengentasan Kemiskinan	Tanggal 7-9 juni 2011. IAPA Region Sulawesi-Maluku, Makassar
8	ASPA Indonesia International. Seminar On “Innovative Governance” and Annual Conference 2012	Institutional Perspective on Implementation of Public Service Network in Indonesia	TanggaL 12-14 Juni 2012. Malang
9	International Conference for Academic Disciplines	Democracy And Efficiency: How Can	Tanggal 22-25 Oktober 2013, Rome, Italy

		Do With Them - An Analysis On Network Of City Transportation Service Delivery	
10	International Conference for Academic Disciplines	Bureaucratic System VS People empowerment Policy: Emprical Evidence Froom Cocoa farmers Empowerment Policy in South Sulawesi Provincw, Indonesia	Tanggal 26 Mei-30 Mei 2014. Harvard University, Boston, USA
11	IAPA Annual Conference 2014.	Bureaucratic Motivation VS Democratic Governance in Public Policy. Note Comuniti Empowermen policy in indonesia	UIN SUSKA RIAU. Pekanbaru 29 s.d 31 Oktober 2014
12	Makalah Terbaik Dipresentasikan: Workshop Social and Ecological Mareket Economy (SEME) 2014	DREAMS MAY COME TRUE: Equitable and Efficient Model of People's Business Development Policy	Tanggal 13-18 Oktober 2014, Grant Hyatt Hotel, Nusa Dua, Bali,
13	International Seminar of Journal of Government And Politics- International Conference	Democratic Model of public Policy Accountability Case Study on Implementation of Street Vendors Empowerment Policy in Makassar city	Tanggal 14 Maret 2015, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
14	Seminar Nasional Indonesian Association For Public Administration (IAPA) Wilayah Sulawesi Maluku.	Jaringan Pengembangan Kapasitas Organisasi Publik: Studi Kasus Penguatan Organisasi Terintegrasi Dalam Implementasi Kebijakan Pemberdayaan PKL di Kota Makassar	Tanggal 6-7 April 2015, UNHAS, Makassar
15	The Sixth Asian Conference on Business & Public Policy 2015	Dilemma Of Values In Public Policy Accountability:	5 – 7 November 2015, The Art Centre of Kobe, Kobe, Japan

		Implementation of The Street Vendors Empowerment Policy Network In Makassar City	
16	International Conference for Social Sciences and Humanities	Collaborative Network Model In The Implementation Of Cocoa Business Development Policy In North Luwu Regency, South Sulawesi Province, Indonesia	31 May – 3 June 2016. Ryerson University, Toronto, Canada
17	International Conference for Social Sciences and Humanities	Could Bureaucracy Be Accountable? Analysis Of Organizational Capacity Development Network In The Implementation Of Street Vendors Empowerment Policy In Makassar City, Indonesia	8-11 November 2016. University of London. London, UK
18	<i>International Conference for Social Sciences and Humanities,</i>	THE POLICY IS NOT WISE: Case Study on Collaborative Local Organization in Implementation of the Cocoa Business Development Policy in North Luwu Regency, Indonesia	Sokol, Prague, Czech Republic, 31 October – 3 November 2017
19	International Conference of Administration Science (ICAS).	CREATING A TRUSTED PUBLIC ORGANIZATION: Organizational Trust Analysis in Implementation Network of the Education Quality Assurance Policy in Indonesia,	Hasanuddin University, Makassar, November 20 – 21, 2017.
20	International Conference For Social Sciences And Humanities,	Collaborative Governance Model in The Implementation of Cocoa Business	Central European University, Nador U. 15, Budapest, Hungary, 24 - 27 July 2018

		Development Policy in Indonesia.	
21	International Conference For Social Sciences And Humanities,	Analysis of Cross-Sector Collaboration Process And Structure In The Implementation Of Poor Community Empowerment Policy In Indonesia.	At University of Freiburg, Jerman. 3 - 6 December 2018
22	The 2nd International Conference on Multidisciplinary Perspectives in Social Sciences & Humanities Research.	COMMUNITY BASED-ORGANIZATION: Can It Empower People? Implementation Network of the Food Diversification Policy In Indonesia.	Barcelona, Spain on October 26-27, 2019
23	The 2nd International Conference on Multidisciplinary Perspectives in Social Sciences & Humanities Research.	Local Policy Network For Local Development Encouraging the Strength of Network in Local Tourism Development in Indonesia.	Barcelona, Spain on October 26-27, 2019
24	The Joint Annual Conference Indonesian Association for Public Administration (IAPA) and Asian Group for Public Administration (AGPA) 2019	CROSS-SECTOR COLLABORATION AND PUBLIC POLICY ACCOUNTABILITY: Implementation Network of Food Security Policy in Bone Regency.	Bali, November 11-12, 2019

Makassar, 13 Oktober 2020



Prof. Dr. Alwi . M.Si  
NIP. 196310151989031006